

Politik

(Tantangan sosial politik & t.jwb umat kristen sebagai warga ne Indonesia)

KOMPETENSI SUBTANSI KAJIAN

Menumbuh kembangnya pemahaman politik menurut Alkitab & kesadaran dan penghayatan akan peran sbg gen muda kristen dlm situasi & mas sospol masy Indonesia dewasa ini



SUBSTANSI KAJIAN

1. Pengantar
2. Pengertian, tuj, serta hub politik dgn negara
3. Konsep Alkitab ttg Politik



4. Tang.jwb sospol umat Kristen
5. Politik & Redemokratisasi
6. Hal2 praktis yg perlu dicermati

1. Pengantar

Takut atau antipati thd Politik?

Takut/antipati = tk paham tangg.jwb
sospol yg sgt penting

**'tanggungjawab sosial
politik orang kristen di
Indonesia'' sgt penting!**

dan

**'kenyataan dialog dlm kehid bangsa
perlu pembenahan'.**



1. Pengantar

WARGA BANGSA – WARGA POLITIK

Setiap warga bangsa pasti akan berhadapan dengan politik, baik ketika ia berpolitik atau pun ketika menyatakan tidak berpolitik.

Kenyataan ini mengharuskan setiap warga bangsa memahami politik, walau tidak semuanya melakukan politik praktis. Berbicara tentang politik tidak terpisahkan dari negara, bernegara dan menegara.



2. Pengertian, Tujuan Politik dan Hubungannya dgn Negara

Kata "Politik" dr *polis* atau *politea*:

- kota, negara, btk negara (mis demokrasi)
- hak2 warga negara & pelaksanaannya
- azas2 pem negara, usaha2 pem negara & ambil bgn dlmnya

-Aristoteles: politik = bgn dr etika dlm kegiatan manusia (mahluk2 polis) yg berkelomp (kota atau negara) dan cenderung berkelomp dlm sikap & tindakan

-Etika berpolitik bahas mas2 sipil sosial dlm pensejahteraan, kewajiban & prilaku warga kota, negara, dunia dlm rangka kesejahteraan tsb

-Usaha pensejahteraan = lwt sarana negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif)



3. Konsep Alkitab tentang Politik

- Allah = Pencipta & Tuhan s.sesuatu
- PL: Tuhan bkn sj Pencipta tp Penguasa sa lgs dlm suatu pem theokratis
- PB: Pripsip politik dlm pem yg bkn theokratis = hormati wibawa pem neg dan Allah (Mat.22.1) dng batas2nya
- Org Kristen menaati lembaga negara (Roma 13.1-3) tp bersikap kritis bila terjadi penyelew kuasa atau wewenang Allah diambil alih (Wahyu 13)



4. Tanggungjawab sosial politik

Secara inherent setiap orang dan warga negara memiliki kewajiban dan mempunyai hak untuk turut menentukan keadaan dan kehidupan sosial dan politik. Warga negara adalah bagian yang integral dari unsur pembentuk masyarakat, bangsa dan negara.

Kehidupannya akan dipengaruhi oleh sosial politik dimana ia berada. Tanggung jawab sosial dan politik pada hakekatnya merupakan keterlibatan dalam memperjuangkan terwujudnya keadaan dan kehidupan sosial dan politik berdasarkan tujuan-tujuan yang dimiliki, yang telah disepakati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



4. Tanggung Jawab Sosial Politik

Prof Dr. Franz Magnis-Suseno SJ

Umat Kristiani wajib berpartisipasi dalam semua kehidupan masyarakat. Partisipasi ini sesuai dengan kemampuan dan bukan kesempatan yang ada, termasuk dalam kehidupan politik.

Hal ini sesuai dengan perutusanNya, kita diutus menjadi saksi Kristus dalam masyarakat. Menjadi garam dalam masyarakat.



Segitiga acuan tanggungjawab sosial dan politik

Umat Kristen Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia juga memiliki dan mengemban tanggungjawab sosial politik yang sama dengan warga negara lainnya. Ini berarti bahwa umat Kristen Indonesia baik sebagai individu maupun kelompok, juga mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila.

1. IMAN KRISTEN

2. PANCASILA

3. KEYAKINAN LAINNYA



4. Tanggungjawab sosial politik

Manusia diciptakan Allah sesuai dengan martabat dan hak-hak yang sama, yang melekat pada dirinya sebagai manusia yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Hak itu adalah hak azasi manusia.

Manusia ditugaskan oleh Allah Yang Maha Kasih untuk melakukan tugas penatalayanan alam semesta beserta seisinya, demi terciptanya masyarakat yang damai sejahtera. Allah mengasihi semua manusia, dan mengajarkan manusia agar saling mengasihi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia juga terpanggil untuk saling mengasihi.

Manusia memang mempunyai kemungkinan untuk konflik dengan sesamanya dengan berbagai penyebabnya, namun konflik itu pun perlu diselesaikan dalam suasana kasih.



Tanggungjawab sosial politik, umat kristiani mengacu pada beberapa nilai berikut ini, yaitu:

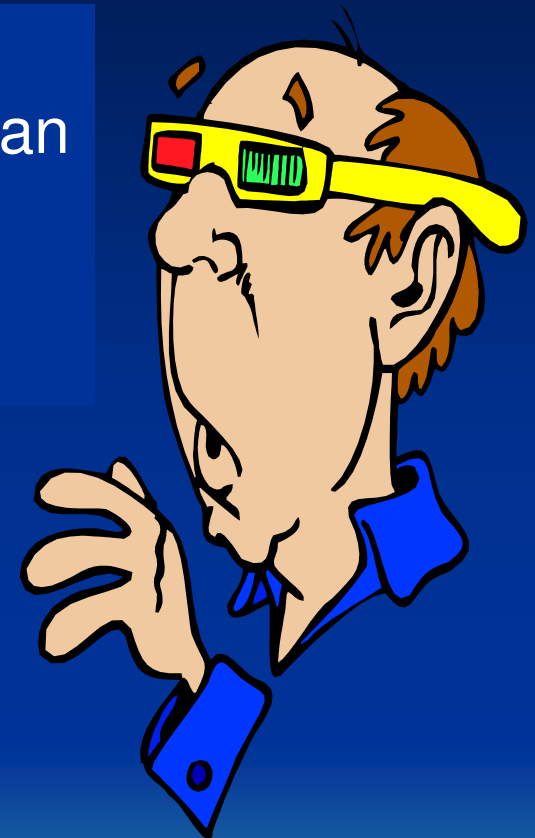
- 1. Kebebasan** – kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan.
- 2. Kemerdekaan** – merdeka dari ketakutan, merdeka dari penindasan dan cengkraman pihak mana pun.
- 3. Rendah hati** – tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan orang lain, sikap mendengar dan melayani.



4. Tulus – berani menerima kenyataan termasuk menerima kekalahan, perkataan sesuai dengan perbuatan, dan tidak menyembunyikan niat buruk dibalik perhatian.

5. Jujur – menyatakan benar untuk hal yang benar dan menyatakan salah untuk hal yang salah, objektif dan berani mengakui kekurangan.

6. Kepeloporan – kesiapan mengambil prakarsa untuk meningkatkan prestasi demi kepentingan bersama.



7. Kasih – mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, mengakui bahwa semua manusia adalah bersaudara, sebagai manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan citra-Nya.

8. Kesamaan – semua manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, yaitu: hak azasi manusia. Setiap warga berkedudukan sama sebagai sesama warga bangsa, baik dihadapan hukum dan pemerintahan.

9. Keadilan – (1) setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil (2) negara harus berlaku adil kepada semua warga negaranya – (3) negara harus menjamin agar setiap orang mendapat keadilan dan (4) negara dapat dikatakan adil kalau setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya antara lain HAM, hak negara dan hak imbalan atas prestasi kerjanya.



10. Kebangsaan – menyadari dan meyakini bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang senasib sepenanggungan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Meyakini bahwa bersama-sama dengan kelompok masyarakat lain mempunyai cita-cita nasional, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.



11. Kesetiaan – setia menjalankan tugas yang dipercayakan bangsa dan negara.

13. Kesetiakawanan – bersikap empati terhadap sukses dan kegagalan orang lain, setia kepada kawan, tetangga dan masyarakat, terutama saat mereka menderita kesusahan, suka menolong orang yang kesusahan

Makna sebuah dialog dalam rangka etika politik:

Tanggungjawab sosial dan politik warga negara itu menggunakan titik tolak dan pendekatan dari arti dan konsekuensi komunitas sebagai tuntutan eksistensi kemanusiaan manusia. Dalam hubungan ini perlu disadari bahwa komunitas nasional terdiri dan terbentuk oleh berbagai komunitas-komunitas yang lebih kecil/terbatas, yang masing-masing memiliki identitas serta kepentingan sendiri-sendiri.

Komunitas-komunitas tersebut sering masih bersifat dan bersikap eksklusivistis, sehingga secara potensial merupakan bahaya dan ancaman terhadap terwujudnya komunitas nasional yang nilai-nilai universal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pancasila.



DIALOG OTENTIK DAN BUKAN KOSMETIS

Demi terwujudnya komunitas nasional seperti yang dicita-citakan perlu diupayakan agar sifat dan sikap yang eksklusif dengan semua bentuk manifestasinya itu dapat diiadakan/setidaknya dikurangi.

Dialog dan kerja sama yang secara spontan dan sporadis yang menyentuh hal-hal yang mendalam dan prinsipal yang merupakan identitas dari pihak-pihak yang berdialog dan bekerjasama itu.

Artinya, dialog dan kerja sama perlu dimengerti sebagai bagian yang fundamental dalam rangka tanggungjawab sosial dan politik. Dalam kenyataan kehidupan dan kegiatan sehari-hari, dialog dan kerja sama itu sebenarnya secara wajar dan spontan lebih banyak dilakukan melalui lingkungan pergaulan dan kehidupan bertetangga, ikatan keluarga dan kekerabatan dan sebagainya.

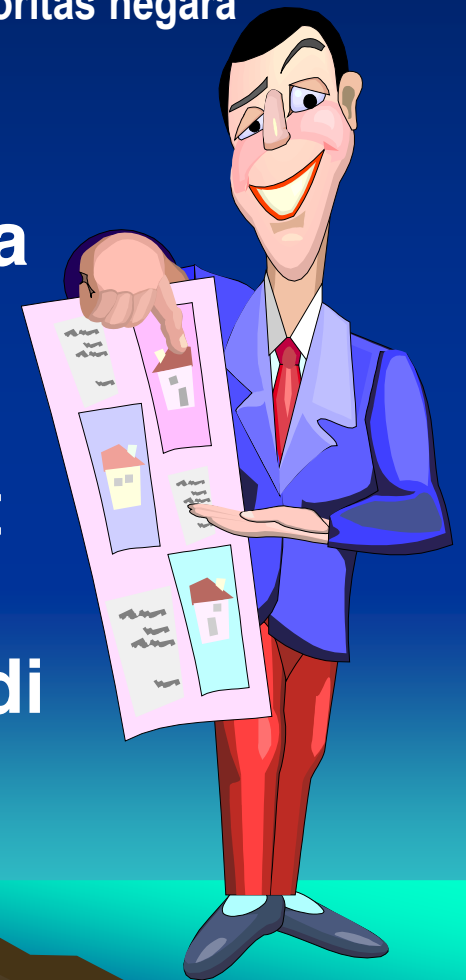


3. Politik dan Redemokratisasi dalam Era Reformasi

Situasi & Masalah dalam Era Reformasi

32 Tahun Pemerintahan Orde Baru : Konsentrasi Kekuasaan pada pejabat tinggi negara dan kelompok elitnya. Hak politik, Ekonomi, hukum banyak diarahkan.
"Korporatisme" dan "stabilisasi" = instrument untuk peliharaan dominasi superioritas negara

Temuan atau opini pribadi tentang fakta politik yang tidak berpihak pada rakyat, di-sharing pada kelompok masing-masing yang anggotanya sudah ditentukan. Sharing ini sangat berguna untuk melakukan semacam pengujian pendapat atau opini pribadi oleh kelompok.



DISKUSI PLENO

Setelah berdiskusi kelompok selama 30 menit, masing-masing kelompok melaporkan pada diskusi-pleno tentang temuan kelompok sehubungan dengan topik politik saat itu.

Fokus utama proses diskusi pleno pada peluang dan hambatan mahasiswa Kristen untuk mewujudkan hak dan kewajiban politisnya sebagai warga bangsa Indonesia.

Jika diperlukan dosen – sebagai fasilitator - bisa memberikan pendapatnya sehubungan dengan hal-hal tertentu, tanpa bertendensi mendikte percakapan diskusi pleno.



3. Allah Tritunggal

2. Perjanjian Lama dan Doktrin Allah Tritunggal



3. Allah Tritunggal

3. Perjanjian Baru dan Doktrin Allah Tritunggal



3. Allah Tritunggal

3. Essens yang satu dan Oknum yang tiga
 1. Dalam Kebradaan Allah ada Satu Essens (substansi) yang tak dapat dibagi

3. Allah Tritunggal

2. Keberadaan Allah terdiri dari tiga (3) Oknum

3. Allah Tritunggal

3. Essens (yang tak dapat dibagi – bagi) ada dalam ke-3 oknum itu

3. Allah Tritunggal

4. Subsistansi Ke-3 Oknum Allah Tritunggal Menurut Urutan



3. Allah Tritunggal

4. Kesimpulan